

## REVITALISASI BAHASA DAN SAstra DAERAH DI NTB: DILEMA ANTARA IMPLEMENTASI DAN REGULASI SEBAGAI MUATAN LOKAL

Oleh  
Mochammad Asyhar  
Universitas Mataram  
e-mail: [m.asyhar@unram.ac.id](mailto:m.asyhar@unram.ac.id)

### Abstract

Based on UNESCO data, in one year ten languages in the world become extinct. The rate of extinction is expected to be even faster in the 21st century. The conditions as described by one of the UN organizations can occur in regional languages in Indonesia, including three regional languages in NTB, if no conservation is carried out. One of the most effective ways to preserve local languages is certainly through teaching local languages. However, the implementation of local language teaching is not as easy as building classrooms in schools. Including regional language teaching in the education curriculum cannot be achieved without the support of regulations from the local government where the local language is used. Also, the implementation of regional language teaching, especially the three regional languages in NTB, will be able to run well if it is preceded by the development of regional language policies, namely the standardization and design of teaching the NTB regional languages.

**Keywords:** Sasak, Samawa, Mbojo, local content, revitalization

### PENDAHULUAN

Pada 2014 UNESCO merilis pernyataan bahwa setiap tahun ada sepuluh bahasa di dunia yang punah dan pada abad ke-21 diperkirakan laju kepunahan bahasa akan lebih cepat lagi. Saya sengaja mengawali artikel ini dengan mengutip nukilan berita dari media daring *Pelita*. Pernyataan di atas sebagai penyadar bahwa bahasa-bahasa di Nusantara juga bisa mengalami hal serupa, tidak terkecuali bahasa-bahasa daerah di Nusa Tenggara Barat. Itu tidak boleh terjadi sebab kepunahan sebuah bahasa berarti budaya juga ikut lenyap pula. Apabila sebuah budaya musnah, nilai-nilai kearifan yang diemban budaya tersebut juga akan mati.

Betapa bahasa memang erat kaitannya dengan budaya masyarakat penuturnya seperti dituturkan Gunarwan (2011). Pendapatnya dinyatakan dalam tiga kalimat berikut. Bahasa memiliki peran yang penting dalam hubungannya

dengan budaya suatu masyarakat, yaitu sebagai alat transmisi budaya itu dari generasi ke generasi. Jika asumsi dasar ini diterima, implikasi yang dapat ditarik ialah bahwa melemahnya bahasa dapat menyebabkan menurunnya budaya masyarakat yang bersangkutan. Hal ini berarti ada korelasi positif antara bahasa dan ketahanan budaya.

Saya setuju dengan pendapat di atas. Menurut saya pendapat Gunarwan tersebut dapat dianalogikan kepada konteks kedaerahan yang berkaitan dengan bahasa-bahasa daerah dan budaya suku-suku yang hidup dan berkembang di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagaimana diketahui, wilayah NTB yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa didiami tiga suku asli, yakni suku Sasak di Pulau Lombok serta suku Sumbawa (*tau* Samawa) dan suku Bima (*dou* Mbojo) di Pulau Sumbawa. Ketiga suku tersebut hidup

dalam budaya dan mengembangkan masing-masing kebudayaan mereka. Setiap anggota masing-masing suku itu harus mengetahui dan mempercayai kebudayaan mereka agar dapat bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima oleh para anggota masyarakat dalam masing-masing suku. Dalam hal ini ketiga bahasa daerah di NTB memiliki peran penting di dalam proses mengetahui dan mempercayai yang dimaksud, sehingga bahasa Sasak, bahasa Sumbawa atau *basa Samawa*, dan bahasa Bima atau *nggahi Mbojo* adalah komponen penting dalam kebudayaan Sasak, kebudayaan Sumbawa, dan kebudayaan Bima, sehingga mereka memiliki peran yang penting di dalam ketahanan kebudayaan (Gunarwan, 2011).

Sehubungan dengan hal di atas, meskipun masing-masing bahasa daerah di NTB belum menunjukkan pergeseran yang berarti, upaya-upaya pelestarian bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, dan bahasa Bima tetap harus dilaksanakan. Ketiga bahasa daerah tersebut di daerah-daerah atau wilayah pedesaan di seluruh NTB tentu masih konsisten digunakan, namun di kota provinsi seperti Mataram, terutama di kompleks-kompleks perumahan dengan penghuni dari beragam etnis, bahasa daerah sudah jarang digunakan, khususnya oleh anak-anak. Mereka cenderung diperkenalkan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Hal ini sepadan dengan yang dikemukakan Mbetse (2011) bahwa sebagian besar anak Indonesia yang berada di kota-kota, juga anak-anak yang berasal dari keluarga dwisuku, dan yang berpendidikan relatif tinggi, sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Kondisi terbaiknya adalah mereka sebagai penutur pasif bahasa ibu orang tua mereka, hanya mampu

meresepsi; tidak mampu memproduksi bahasa daerah orang tua mereka.

Salah satu usaha untuk melestarikan ketiga bahasa daerah tersebut adalah melalui jalur pendidikan, yakni pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal. Akan tetapi, pelaksanaan pengajaran bahasa daerah di NTB, seperti halnya dialami daerah-daerah lain, mengalami pasang surut. Terlebih lagi setelah kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan dari SD-SMA pada tahun ajaran 2014-2015 lalu, bahasa daerah lagi-lagi tidak mendapat tempat pada jenjang sekolah-sekolah tersebut. Selain itu, merujuk kepada tahun-tahun ajaran sebelumnya, pengajaran bahasa daerah di provinsi ini juga tidak dilaksanakan secara ajeg karena tidak semua satuan pendidikan melaksanakan pengajaran bahasa daerah.

Berdasarkan survei kecil melalui wawancara dengan beberapa mahasiswa yang berasal dari Lombok, Sumbawa, dan Bima, diperoleh informasi bahwa tidak semua responden tersebut pernah mendapatkan pelajaran bahasa daerah ketika di SD dan SMP. Responden yang belajar di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama mengaku tidak mendapatkan pelajaran bahasa daerah. Responden yang belajar di pondok pesantren pun juga mengatakan hal senada, tidak pernah menerima pelajaran bahasa daerah di sekolah mereka.

Sementara itu, responden-responden yang pernah mendapatkan mata pelajaran bahasa daerah memberi informasi bervariasi ketika ditanya sampai kelas berapa bahasa daerah diajarkan. Informasi serupa juga diberikan atas pertanyaan tentang materi ajar bahasa daerah yang diberikan. Ini menunjukkan ada ketidakseragaman rancangan pengajaran bahasa daerah pada masing-masing sekolah.

Berdasarkan paparan-paparan di atas, ada satu pertanyaan mendasar yang akan dijawab dalam artikel ini. *Apa penyebab pelaksanaan pengajaran bahasa daerah di NTB belum terselenggara dengan baik?*

### **Implementasi vs Regulasi**

Bangsa Indonesia memang “ditakdirkan” sebagai bangsa yang berwawasan dwiloyalitas. Masyarakat Indonesia, di satu sisi, harus dan wajib loyal kepada Indonesia dalam konteks nasionalisme dan di sisi lainnya sekaligus juga harus tetap mempertahankan nilai-nilai kelokalan mereka dalam konteks kedaerahan. Hal ini berlaku pula dalam hal sikap bahasa dan penggunaan bahasa. Masyarakat Indonesia dituntut untuk bisa menjunjung tinggi bahasa nasional mereka, yakni bahasa Indonesia, dan pada saat yang sama harus tetap memelihara dan melestarikan bahasa daerah mereka.

Kedwibahasaan yang diemban oleh masyarakat Indonesia tersebut sebagaimana dipaparkan pada paragraf sebelum ini, faktanya sekarang, lebih menunjukkan kecenderungan sikap lebih positif kepada bahasa Indonesia sehingga bahasa daerah sedikit mengalami pergeseran. Sehubungan dengan hal itu, pengajaran bahasa sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, bahkan hingga SMA/MA/SMK bersifat sangat urgen. Berkaitan dengan hal ini Mahsun (2011) mengemukakan tiga alasan penting. Ketiga alasan yang dirincinya adalah (1) pengajaran bahasa daerah di sekolah akan semakin melegitimasi bagi upaya pemeliharaan bahasa daerah dan menjadi tindakan preventif untuk mencegah kepunahan bahasa daerah; (2) pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah dasar hingga menengah akan semakin menggairahkan peserta didik

dalam belajar sejarah dan budaya lokal; serta (3) dengan mempelajari bahasa daerah akan diperoleh pemahaman secara empirik tentang makna keanekaragaman dalam ketunggalikaan suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia.

Apa yang dikemukakan Mahsun (2011) di atas memang benar, tetapi pelaksanaan pengajaran bahasa daerah di sekolah memang tidak semudah membicarakannya. Pengajaran bahasa daerah harus melibatkan beberapa hal yang saling terkait. *Pertama*, perangkat untuk implementasi pengajaran bahasa daerah yang berkaitan dengan ragam standar bahasa daerah yang bersangkutan, kurikulum, dan tenaga pendidik. *Kedua*, pengajaran bahasa daerah akan dapat terlaksana dengan baik dan ajeg jika didukung regulasi tentangnya. Pemikiran tentang kedua hal tersebut akan dibicarakan setelah ini secara berturut-turut.

### **Implementasi**

Pengajaran bahasa-bahasa daerah di NTB bisa diimplementasikan secara luas dan efektif jika didukung oleh tiga hal terkait. Ketiga hal yang dimaksud adalah terdapat ragam baku atau standar dari ketiga bahasa daerah, kurikulum baku, dan tenaga pendidik.

#### **1. Standarisasi**

Ketiga bahasa daerah di NTB, bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, dan bahasa Bima memiliki berbagai variasi dalam bentuk dialek. Berdasarkan sumber daring *Ethnologue Languages of The world* (Wikipedia Indonesia), dialek bahasa Sasak terbagi menjadi beberapa variasi, yakni Kuto-Kute (Utara), Ngeto-Ngete (Timur laut), Meno-Mene (Tengah), Ngeno-Ngene (Timur tengah, Barat tengah), Meriaq-Mriku (selatan tengah). Dalam Bahasa Sumbawa, dikenal beberapa dialek regional atau variasi bahasa berdasarkan daerah penyebarannya, yakni dialek

Samawa, Baturotok atau Batulante, dan dialek-dialek lain yang digunakan di daerah pegunungan Ropang, seperti Labangkar, Lawen, serta penduduk di sebelah selatan Lunyuk, selain juga terdapat dialek Taliwang, Jereweh, dan dialek Tongo (Wikipedia Indonesia). Sementara itu, dialek-dialek dari bahasa Bima adalah sebagai berikut, Kolo, Sangar (Sanggar), Toloweri, Bima, Mbojo (Wikipedia Indonesia).

Berdasarkan semua dialek dalam ketiga bahasa di Provinsi NTB itu apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai ragam standar untuk masing-masing bahasa daerah itu? Untuk keperluan pengajaran bahasa daerah di sekolah, tentu harus ada ragam standar yang bisa diambil dari salah satu dialek-dialek tersebut. Pengajaran bahasa Jawa, misalnya, dilaksanakan dengan tata bahasa baku yang diambil dari salah satu dialek bahasa Jawa, yakni dialek Yogyakarta-Surakarta, untuk seluruh wilayah pengguna bahasa daerah yang tidak semuanya menggunakan dialek itu. Wilayah-wilayah dari daerah Jawa Timur dengan berbagai subdialek sampai dengan Jawa Tengah yang terkenal dengan dialek “ngapak”nya tunduk kepada dialek standar bahasa Jawa tersebut untuk pengajaran bahasa Jawa.

Agar pengajaran bahasa daerah dilakukan secara seragam, perlu segera dilakukan standarisasi atau pembakuan kepada bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, dan bahasa Bima. Tentu saja ini bisa terlaksana atas keinginan masyarakat pendukung ketiga bahasa tersebut demi kepentingan pengajaran bahasa-bahasa daerah itu. Sebagaimana dikemukakan Alwi dan Sugono (2011) bahwa pembakuan bahasa daerah perlu dilakukan dengan memperhatikan keinginan masyarakat pendukungnya guna menciptakan komunikasi yang luas dan efektif di kalangan masyarakat

pendukungnya. Apa yang mereka kemukakan itu tersirat pengertian bahwa bahasa daerah standar akan bisa efektif digunakan oleh seluruh masyarakat pendukung bahasa daerah itu, terutama dalam ranah yang berupa situasi dan latar formal.

Standisasi juga diperlukan untuk membantu penyusunan kurikulum baku untuk pengajaran bahasa daerah di sekolah. Alwi dan Sugono (2011) mengatakan pembakuan bahasa daerah dapat dilakukan, antara lain, melalui penyusunan pedoman, kamus bahasa daerah, dan tata bahasa. Adanya hal tersebut maka perlu segera dilakukan penelitian atas bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, dan bahasa Bima guna penentuan dialek mana yang layak ditetapkan sebagai ragam baku atau ragam standar ketiga bahasa itu.

## 2. Kurikulum

Perancangan dan pengembangan kurikulum sangat penting dan harus segera dilakukan dalam rangka usaha pembinaan bahasa daerah melalui jalur pengajaran. Hal itu senada dengan yang diamanatkan dalam rumusan *Politik Bahasa* sebagaimana dikemukakan Alwi dan Sugono (2011). Dalam *Politik Bahasa* itu mereka menyatakan pembinaan bahasa daerah melalui pengajaran bahasa daerah ditujukan untuk meningkatkan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat penuturnya dengan berbagai kegiatan, antara lain pengembangan kurikulum bahasa daerah serta pengembangan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa.

Sehubungan dengan hal itu, setelah ragam standar bahasa Sasak, Sumbawa, dan Bima ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun atau merancang kurikulum baku untuk pengajaran bahasa-bahasa daerah itu.

Seperti apa seharusnya kurikulum bahasa daerah? Seperti halnya kurikulum bahasa Indonesia, kurikulum bahasa daerah dapat juga menganalogi kepada standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) dalam kurikulum bahasa Indonesia. Hal ini berarti bahwa SK-KD itu mencakupi empat keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta berkaitan dengan kesastraan. Adanya hasil rancangan kurikulum yang sudah baku tersebut, penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perancangan metodologi pengajaran untuk pengajaran ketiga bahasa daerah ini pun dapat dilakukan.

Untuk perealisasiannya apa yang dikemukakan dalam dua paragraf sebelum ini, diperlukan keterlibatan berbagai pihak karena merancang sebuah kurikulum baku bukan pekerjaan sederhana. Dalam hal ini, dibutuhkan kerja sama antara pihak Dikpora sebagai unsur Pemerintahan Daerah NTB dan pihak akademisi dari Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) untuk melakukan perancangan kurikulum dan penyusunan bahan ajar bagi pengajaran bahasa daerah Sasak, Sumbawa, dan Bima. Selain itu, pihak lain yang juga harus dilibatkan adalah para tokoh budaya dan tokoh adat sebagai perwakilan masyarakat penutur ketiga bahasa daerah itu.

### 3. Tenaga Pendidik

Upaya peningkatan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa daerah adalah berupa pembinaan kepada pengguna bahasa daerah tersebut. Pembinaan bahasa daerah tersebut dapat dilakukan melalui pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah di tempat bahasa-bahasa daerah tersebut hidup dan digunakan. Selain standarisasi bahasa-bahasa daerah di NTB dan penyusunan kurikulum, untuk itu unsur

yang tidak kalah pentingnya untuk keberhasilan pengajaran bahasa-bahasa daerah tersebut adalah tenaga pendidik yang profesional. Hal ini juga sudah dirumuskan dalam *Politik Bahasa* (Alwi & Sugono, 2011).

“Pasang-surut” penyelenggaraan pengajaran bahasa daerah sebagaimana dipaparkan pada bagian pendahuluan, salah satunya disebabkan oleh faktor tenaga pendidik profesional. Yang dimaksud tenaga pendidik profesional untuk mata pelajaran bahasa-bahasa daerah di NTB adalah guru-guru bahasa daerah yang benar-benar merupakan sarjana pendidikan bahasa dan sastra daerah (Sasak, Sumbawa, dan Bima).

Dapat dipastikan bahwa di provinsi NTB tidak ada guru-guru bahasa daerah sesuai kualifikasi tersebut. Hal ini tentu menjadi peluang bagi LPTK-LPTK di NTB, khususnya FKIP Universitas Mataram, untuk membuka Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah. Akan tetapi, apabila dibuka di satu perguruan tinggi, masalah terkait pendirian program studi ini adalah jumlah bahasa daerah di NTB, yakni tiga bahasa daerah. Menurut hemat saya, pelaksanaan pendidikan tenaga pendidik bahasa-bahasa daerah di NTB dapat diselenggarakan di beberapa perguruan tinggi sesuai tempat bahasa daerah tersebut digunakan. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Sasak dapat dibuka di salah satu LPTK di Pulau Lombok. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Sumbawa dibuka oleh salah satu LPTK di Kabupaten Sumbawa atau Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara itu, pendidikan untuk tenaga pendidik bahasa dan sastra Bima dapat diselenggarakan oleh LPTK di Bima atau Dompu.

Bagaimana dengan tenaga pendidik sebelum LPTK-LPTK

mendirikan lalu meluluskan para sarjana pendidikan bahasa dan sastra daerah? Untuk sementara waktu, pelaksanaan pengajaran bahasa dan sastra daerah dapat diserahkan kepada guru-guru mata pelajaran lain yang dianggap mamiliki kompetensi dalam bahasa dan sastra masing-masing daerah di NTB asalkan kurikulum dan buku ajar sudah tersusun dengan standar kualitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan pengembangan bahasa-bahasa daerah itu.

### **Regulasi**

Kebijakan bahasa-bahasa yang berkembang dan digunakan di Indonesia memang sudah diatur dalam *Politik Bahasa*. Kebijakan tersebut menyangkut eksistensi bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa asing. Melainkan khusus pelaksanaan kebijakan untuk bahasa-bahasa daerah, tentu harus diatur oleh pemerintah daerah tempat masing-masing bahasa daerah tersebut digunakan. Aturan-aturan tersebut dapat berupa undang-undang yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) terkait pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap bahasa daerah. Perda semacam itu untuk masa sekarang sangat diperlukan. Keberadaannya dapat mengikat setiap pelaksana pendidikan yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan untuk tetap memasukkan pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di wilayahnya dalam setiap kurikulum pendidikan nasional yang berlaku.

Sehubungan dengan hal itu, Pemda NTB sudah waktunya memprogramkan perancangan dan peluncuran perda tentang kelangsungan hidup bahasa-bahasa daerah di wilayahnya. Pemda NTB tentu dapat melakukan studi banding ke beberapa pemerintah daerah lain, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan

Lampung, yang sudah dan berencana meluncurkan perda serupa.

Daerah-daerah di atas memang sudah memiliki perda tentang bahasa daerah. Provinsi Jawa Timur, misalnya, membuat undang-undang khusus tentang bahasa daerah dan pengajarannya yang dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub), yakni Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah. Dalam pergub disebutkan bahwa pembelajaran bahasa Jawa wajib diberikan minimal 2 Jam Pelajaran tiap minggunya. Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah ini juga diwajibkan ada pada tingkat SD/MI/SDLB (Kelas I-VI), SMP/MTS/SMPLB (Kelas VII-IX), dan tingkat SMA/MA/SMALB, SMK (Kelas X-XII). Provinsi Jawa Tengah bahkan sudah memiliki Undang-Undang Bahasa Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Pembinaan, Pemeliharaan, dan Perlindungan Bahasa dan Aksara Jawa. Dalam perda ini ditegaskan bahwa semua sekolah wajib menjadikan bahasa daerah menjadi muatan lokal. Selanjutnya, Provinsi Jawa Barat mengatur pengajaran bahasa Sunda dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Perda ini kemudian diperbarui menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Dalam perda itu juga diakui keberadaan tiga suku asli di Jawa Barat, yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda, dan Suku Cirebon yang bertutur

Bahasa Cirebon (dengan keberagaman dialeknya), termasuk usaha pemeliharaan melalui lembaga pendidikan dengan memasukannya dalam kurikulum. Contoh pemerintah daerah lain yang sudah membuat undang-undang bahasa daerah adalah Provinsi Lampung. Pemda Provinsi Lampung meluncurkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan yang di dalamnya termasuk peraturan tentang pemeliharaan bahasa dan aksara Lampung.

Pemda Provinsi NTB bisa Bercermin dari apa yang sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah lain sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Sudah saatnya Pemda Provinsi NTB bersama akademisi serta para tokoh adat dan budaya bekerja bahu-membahu untuk membuat rancangan undang-undang dalam bentuk perda atau pergub tentang pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa Sasak, Sumbawa, dan Bima.

Apabila perda tentang pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa-bahasa daerah di NTB sudah dirancang, disahkan, dan diluncurkan, itu dapat mengikat secara hukum kepada para penyelenggara pendidikan, baik sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah swasta, yang berada di wilayah pemerintahan Provinsi NTB agar melaksanakan pengajaran bahasa-bahasa daerah sesuai dengan wilayah pemakaian bahasa-bahasa daerah itu. Selain itu, keberadaan regulasi tentang bahasa daerah akan meningkatkan gairah pelaksanaan pengajaran bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, dan bahasa Bima dalam bentuk pengembangan atas ketiga bahasa tersebut dalam bentuk penelitian untuk penentuan ragam dialek standar mereka, juga

perancangan dan pengembangan kurikulum pengajaran, serta meningkatkan animo lulusan SMA untuk memilih Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah untuk menjadi guru-guru bahasa daerah profesional.

## **PENUTUP**

Suku-suku bangsa di Nusantara hidup dalam masing-masing budaya yang khas. Selain itu, masing-masing suku itu berkomunikasi dengan bahasa yang khas pula. Bahasa yang berkembang dan digunakan masyarakat setiap suku di Nusantara dimaksud dinamakan bahasa daerah. Budaya dan bahasa daerah tidak pernah terpisahkan dengan kehidupan masyarakat setiap suku. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suku bangsa, budaya lokal, dan bahasa daerah adalah tiga aspek yang saling terikat dalam konteks kedaerahan di Nusantara. Hal itu berlaku pula bagi tiga bahasa daerah, yakni bahasa Bima, bahasa Sumbawa, dan bahasa Sasak, di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Fungsi tiga bahasa daerah di NTB dalam konteks di atas, di samping sebagai alat komunikasi di antara anggota suku pemilik suatu bahasa daerah adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai kearifan lokal antargenerasi melalui saluran, baik lisan maupun tulisan. Karena fungsinya tersebut, bahasa Bima, bahasa Sumbawa, dan bahasa Sasak harus tetap terjaga kelestariannya agar warisan nilai-nilai luhur suku bangsa penutur ketiga bahasa daerah itu juga akan tetap eksis tak tergerus oleh pengaruh perkembangan zaman.

Salah satu usaha untuk tetap menghidupkan dan melestarikan tiga bahasa daerah tersebut adalah melalui pengajaran bahasa daerah, termasuk

sastra daerah dan aksara daerah, sebagai muatan lokal di setiap kurikulum yang silih berganti diterapkan dalam dunia pendidikan di seluruh Indonesia. Namun demikian, eksistensi implementasi pengajaran bahasa daerah tidak semudah mengganti kurikulum pendidikan di Indonesia. Implementasi pengajaran tiga bahasa daerah di NTB ini membutuhkan penentuan standarisasi ketiga bahasa daerah itu, membutuhkan kurikulum dan buku-buku ajarnya, membutuhkan banyak guru profesional untuk ketiga bahasa daerah itu, serta yang paling esensial adalah membutuhkan regulasi berupa perda tentang pembinaan dan pemeliharaan bahasa daerah yang salah satunya melalui pengajaran bahasa daerah, pengembangan, dan perlindungan bahasa-bahasa daerah. Semoga hal ini segera dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Cetakan:

- Alwi, Hasan dan Sugono, Dandy (ed). 2011. *Politik Bahasa: Rumusan Seminar Politik Bahasa*. Jakarta. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gunarwan, Asim. 2011. "Pembalikan Pergeseran Bahasa Daerah untuk Memperkukuh Budaya Bangsa" dalam *Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi*. Jakarta. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mahsun. 2011. "Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat

Indonesia: ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah" dalam *Politik Bahasa*. Jakarta. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mbete, Aron Meko. 2011. "Pemekaran Fungsi Bahasa Daerah Demi Ketahanan Budaya Bangsa" dalam *Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi*. Jakarta. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### Daring:

"Bahasa Bima".

[http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa\\_Bima](http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bima) (Diakses pada 9 Maret 2020 pukul 21.50 Wita).

"Bahasa Sumbawa".

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa\\_Sumbawa](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sumbawa) (Diakses pada 9 Maret 2020, pukul 21.55 Wita).

"Bahasa Sasak".

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa\\_Sasak#Dialek](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sasak#Dialek) (Diakses pada 9 Maret 2020, pukul 22.00 Wita).

"Setiap Tahun 10 Bahasa Punah" dalam *Harian Umum Pelita Daring*. <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=8101> (Diakses pada 2 Oktober 2014, pukul 10.04 Wita).

"Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah". <http://www.harrywidhiarto.com/2017/04/pergub-no-19-tahun-2014->

pelaksanaan.html (Diakses pada 9 Maret 2020, pukul 22.30).

“Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa”.  
<https://elibrary.dprd.jatengprov.go.id/peraturan-daerah-provinsi-jawa-tengah-nomor-9-tahun-2012>  
(Diakses pada 9 Maret 2020, pukul 22.56).

“Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara

Daerah”.

<http://jdih.jabarprov.go.id/page/urusan/49> (Diakses pada 9 Maret 2020, pukul 23.12).

“Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung”.  
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/direktorat-ppk/78-peraturan-perundang-undangan/daftar-peraturan-daerah/241-peraturan-daerah-provinsi-lampungtahun-2008.html> (Diakses pada 3 Maret 2020, pukul 23.16).